

DINAMIKA DAN PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PENDIDIKAN ISLAM SEJAK ERA KOLONIALISME HINGGA MASA KINI

Oleh : Ali Maulida*

Abstract

In the history of Islamic education in Indonesia, pesantren has a very important role. The development of Islamic education that exist today can not be separated by the dynamic development of the pesantren world from the beginning of its history to the modern era with all its attending problems. Role is not only limited to the dissemination of knowledge and the propagation of Islam to various parts of the country, but also in building the spirit of resistance among Muslims against the invaders in the early days of its development .

Pesantren has played a very important role in the history of the lives of Muslims and even the Indonesian people in general. Pesantren is not only a place to gain knowledge, and spreading Islamic proselytizing, but also a place to cultivate resistance to the colonial government of the Indonesian nation.

Based on the statistical data presented, it appears that the boarding school has experienced a very significant development, both from the number of boarding schools as well as students who are learning. Data on the number of students by category and type of formal education that followed showed enough public awareness to get the full Islamic education including formal channels.

In the education system that is applied by the institution of pesantren are many positive values that should be preserved and developed, such as; a heightened awareness that the process of learning as religious activities, the good relations between teachers (clerics, religious teacher) and student (students), pesantren as a place for science that is free from worldly purpose only, the values in the life of a dorm like, equation rights, putting an obligation rather than asking for the right, and so forth.

On the other hand there are still many negative side of the process of education schools that must be addressed, including: the tendency of neglect life of the world, the attitude of fatalistic who disassociate ourselves without strong efforts in achieving the goal, absolute obedience to the teachers who tend to steer students to not think critically, and so forth.

Keywords: pesantren, dakwah Islam, pendidikan Islam, kolonialisme.

* Dosen Tetap Prodi PAI STAI Al-Hidayah Bogor

A. Pendahuluan

Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, pesantren memiliki peranan yang sangat penting. Perkembangan dunia pendidikan Islam yang ada saat ini tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan dunia pesantren dari awal sejarahnya hingga era modern saat ini dengan segala problematikanya. Peran yang dimaksud tidak hanya terbatas pada penyebaran ilmu dan dakwah Islam ke berbagai penjuru tanah air, tapi juga dalam membangun jiwa perlawanan umat Islam terhadap penjajah di masa awal perkembangannya.

Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional. Lembaga ini telah hidup sejak 300-400 tahun yang lampau, menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim. Pesantren telah diakui sebagai lembaga pendidikan yang telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Di zaman kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berjasa bagi umat Islam. Tidak sedikit pemimpin bangsa terutama dari angkatan 1945 adalah alumni atau setidaknya pernah belajar di pesantren.¹

Melihat peranan yang demikian besar dan luasnya pembahasan, maka dalam tulisan ini akan dipaparkan dinamika perkembangan pesantren sejak era kolonialisme hingga masa kini, dan visi pengembangannya di masa yang akan datang.

¹ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 3.

B. Asal Usul Pondok pesantren dan Perkembangannya

Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan pendidikan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara telah dimulai sejak tahun 1596. Kegiatan pendidikan agama inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren.²

Pesantren bisa dikatakan ‘bapak’ dari pendidikan Islam di Indonesia, yang didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, di mana bila dirunut kembali sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah islamiyah, yaitu menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama dan da’i.³

Pesantren sendiri secara bahasa berarti ‘tempat belajar para santri’. Pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Kata pondok berasal dari bahasa Arab ‘*funduq*’ yang berarti asrama. Di Jawa dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan istilah *dayah* atau *rangkang* atau *meunasa*, sedangkan di Minangkabau disebut *surau*.

² Lihat Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012, pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf, diunduh pada 21 September 2016.

³ Lihat Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 138.

Pada umumnya berdirinya suatu pesantren diawali dari pengakuan masyarakat akan keunggulan dan ketinggian ilmu seorang guru atau kyai. Karena keinginan menuntut dan memperoleh ilmu dari guru tersebut, maka masyarakat sekitar bahkan dari luar daerah datang kepadanya untuk belajar. Mereka lalu membangun tempat tinggal yang sederhana di sekitar tempat tinggal guru tersebut. Semakin tinggi ilmu seorang guru, semakin banyak pula orang dari luar daerah yang datang untuk menuntut ilmu kepadanya, dan berarti semakin besar pula pondok pesantrennya.

Para santri yang tinggal di pondok pesantren walaupun bermacam-macam dan dari berbagai kalangan, mereka hidup seperti satu keluarga di bawah pimpinan gurunya. Mereka belajar hidup sendiri, mencuci, dan mengurus keperluan mereka sendiri. Dahulu, bahan-bahan keperluan hidup seperti beras dan sebagainya mereka bawa dari kampung masing-masing.⁴

Pesantren di Indonesia memang tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini menunjukkan besarnya animo dan semangat kaum muslimin untuk belajar ilmu Islam sejak dahulu. Berdasarkan laporan pemerintah kolonial Belanda, pada abad ke-19 untuk di Jawa saja terdapat tidak kurang dari 1.853 buah, dengan jumlah santri tidak kurang dari 16.500 orang. Dari jumlah tersebut belum termasuk pesantren-pesantren yang berkembang di luar Jawa terutama Sulawesi dan Kalimantan yang suasana keagamaannya terkenal sangat kuat.

Kemudian pada zaman penjajahan Jepang, dari hasil survey yang

diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama pemerintah militer Jepang, didapatkan data tentang jumlah pesantren dan madrasah di Jawa, yaitu :

Daerah	Jumlah Pesantren dan Madrasah	Jumlah Santri
Jakarta	167 buah	14.513 orang
Jawa Barat	1.046 buah	69.954 orang
Jawa Tengah	351 buah	21.957 orang
Jawa Timur	307 buah	32.831 orang
Jumlah	1.871 buah	199.415 orang

Dari jumlah tersebut sebenarnya masih belum termasuk pesantren-pesantren kecil yang hanya memberikan pengajian al-Qur'an tingkat dasar di langgar-langgar dan masjid. Padahal pada sensus tahun 1885 lembaga pengajian al-Qur'an tingkat dasar tersebut masuk ke dalam kriteria pesantren.⁵

C. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dan Perlawanan Pesantren

Aqib Suminto memaparkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terkait pendidikan dan Islam sebagaimana dalam disertasinya, bahwa kelestarian penjajahan betapapun merupakan impian politik pemerintah kolonial. Sejalan dengan pola ini, maka kebijakan di bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai

⁴ Zuhairini, et. al, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 213.

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, dalam Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, hlm. 139-140.

saingan yang harus dihadapi. Pendidikan Barat diformulasikan sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Karena itulah kebijakan yang diterapkan pun berpihak pada kepentingan Belanda dan mendiskreditkan rakyat Indonesia yang notabene mayoritasnya adalah umat Islam.

Pada akhir abad ke-19, Snouck Hurgronje telah begitu optimis bahwa Islam tidak akan sanggup bersaing dengan pendidikan Barat. Agama ini dinilai beku dan menjadi penghalang kemajuan, sehingga harus diimbangi dengan meningkatkan taraf kemajuan pribumi.

Agaknya 'ramalan' tersebut belum memperhitungkan faktor kemampuan Islam untuk mempertahankan diri di negeri ini, juga belum memperhitungkan faktor kesanggupan Islam menyerang kekuatan dari luar untuk meningkatkan diri. Memang cukup alasan agaknya untuk merasa optimis. Kondisi obyektif pendidikan Islam pada waktu itu memang sedemikian rupa, sehingga diperkirakan tidak akan mampu menghadapi superioritas Barat, tidak akan sanggup melawan pendidikan Kristen yang jauh lebih maju dalam segala bidang, dan tidak akan bisa berhadapan dengan sikap diskriminatif pemerintah kolonial yang notabene sangat berpihak pada kalangan kristiani. Tetapi kemudian kondisi ini berkembang menjadi berbeda dengan perhitungan dan 'ramalan' tersebut.

Kesadaran bahwa pemerintah kolonial merupakan pemerintahan kafir yang menjajah agama dan bangsa mereka semakin mendalam tertanam di benak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam saat itu mengambil sikap anti Belanda. Sampai uang yang diterima seseorang

sebagai gaji dari pemerintah Belanda dinilai sebagai uang haram. Celana dan dasi pun dianggap haram karena dinilai sebagai pakaian identitas Belanda.

Sikap konfrontasi kaum santri dengan pemerintah kolonial ini terlihat pula pada letak pesantren di Jawa pada waktu itu, yang pada umumnya tidak terletak di tengah kota atau desa, tapi di pinggiran atau bahkan di luar keduanya.⁶

Di mata umat Islam, pemerintah kolonial sering dituduh sebagai pemerintahan Kristen, sementara pelbagai kebijakan pemerintah maupun aktivitas *zending* dan *missi* sendiri justru sering mempersubur tuduhan tersebut. Sekolah-sekolah Kristen yang umumnya diberi subsidi oleh pemerintah kolonial sering mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid Islam. Sekolah-sekolah negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda suatu aliran gereja. Semua ini ikut memperdalam jurang pemisah antara pemerintah kolonial dengan masyarakat santri. Aksi menimbulkan reaksi. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya umat Islam berusaha mempertahankan diri, dan kemudian ternyata berhasil.⁷

Pemerintah kolonial Belanda memang melakukan berbagai cara untuk menekan dan mendiskreditkan pendidikan yang dikelola oleh pribumi, tak terkecuali dalam hal ini pondok pesantren. Sikap yang demikian dilakukan Belanda tidak semata-mata untuk menghambat jalannya proses pendidikan pada pesantren, tetapi

⁶ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoort voor Inlandsce zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 49-51.

⁷ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoort voor Inlandsce zaken*. hlm. 51.

ada alasan-alasan lain yang tampaknya mendasari mengapa pemerintah kolonial Belanda bersikap demikian. Sebab pada zaman penjajah tersebut di kalangan pemerintah kolonial timbul dua alternatif untuk memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, yaitu memberikan lembaga pendidikan berdasarkan pendidikan tradisional, yaitu pesantren, atau mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem yang berlaku di Barat pada waktu itu.

Penyelenggaraan pendidikan di pesantren ini menurut pemerintah kolonial Belanda terlalu jelek dan tidak memungkinkan untuk menjadi sekolah modern. Oleh karena itu mereka mengambil alternatif kedua yaitu mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan yang telah ada.

Tapi ternyata dengan diselenggarakannya pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda ini, justru tidak lebih memberikan keleluasaan pendidikan pesantren yang dikelola orang-orang pribumi atau umat Islam.

Oleh karena itu antara kedua sistem pendidikan tersebut terdapat perbedaan yang cukup mencolok, dan bahkan bisa dikatakan kontradiktif. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya adalah :

- a. Pendidikan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah Belanda bersifat netral.
- b. Pendidikan di madrasah dan pondok pesantren tidak terlalu memikirkan bagaimana cara hidup harmonis di dunia, tetapi menekankan kepada bagaimana memperoleh penghidupan.
- c. Sekolah-sekolah yang dikelola Belanda diselenggarakan berdasarkan perbedaan kelompok etnis dalam masyarakat, dan

untuk mempertahankan perbedaan kelas dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan orang Jawa.

- d. Sebagian besar sekolah kolonial diarahkan pada pembentukan kelompok masyarakat elit yang bisa dipergunakan untuk mempertahankan supremasi politik dan ekonomi Belanda di negeri jajahannya. Dengan demikian sekolah-sekolah ini benar-benar mencerminkan kebijakan pemerintah Hindia Belanda.⁸

Pada tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan suatu peraturan tentang pendidikan Agama Islam yang disebut dengan *Ordonansi Guru* yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Madura, kecuali Yogya dan Solo. Dalam *Staatsblad* 1905 no. 550 terdapat aturan yang sangat memberatkan umat Islam khususnya para praktisi pendidikan saat itu, antara lain:

- 1) Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati.
- 2) Izin tersebut baru dapat diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan.
- 4) Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar tersebut sewaktu-waktu.
- 5) Guru Agama Islam bisa dihukum kurung maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima rupiah

⁸ Selo Soemarjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, dalam Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, hlm. 148-149.

bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/ mengirimkan daftar tersebut atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberi keterangan, atau enggan diperiksa oleh yang berwenang.

- 6) Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.⁹

Bagi sekolah yang telah memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi ini memang tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki administrasi yang memadai dalam mengelola pengajiannya, peraturan ini terasa sangat memberatkan. Apalagi pada waktu itu lembaga pendidikan pesantren belum memiliki administrasi yang teratur, daftar murid dan guru atau mata pelajaran. Banyak di antara guru agama waktu itu yang tidak bisa membaca huruf Latin, sedangkan yang bisa pun sangat jarang yang mempunyai mesin tulis untuk mengisi sekian lembar daftar laporan.¹⁰

Ordonansi yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda tersebut sangat jelas diterapkan untuk mengontrol dan mengawasi secara ketat perkembangan pendidikan Islam dan membatasi laju pertumbuhan lembaga-lembaga dan aktivitas para tenaga pendidikan Islam di masa itu. Dengan kewajiban mendapatkan izin mengajar oleh bupati tersebut, maka tidak setiap orang yang memiliki kemampuan mengajar dan ilmu keislaman dapat secara otomatis berkiprah di lembaga pendidikan Islam. Terlebih adanya sangsi sebagaimana diatur dalam ordonansi tersebut telah menjadi *filter* yang

menyaring tenaga-tenaga yang tidak dapat memenuhi kriteria administratif tersebut.

D. Perkembangan Kelembagaan Pondok pesantren Pasca Kemerdekaan

Pada laman situs resmi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren Kementerian Agama - <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/> - dimuat sejarah singkat perkembangan pondok pesantren dengan dinamikanya dari masa ke masa.

Sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang telah dimulai pada awal abad XX M hingga dewasa ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Di mana perkembangan cukup drastis terjadi pada masa orde lama dan terus berkembang pada masa orde baru. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan :

“Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah“

Masih dari laman yang sama dijelaskan bahwa Pendidikan Agama juga diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu :

1. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid

⁹ Aqib Suminto, hlm. 52-53.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 53.

menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.

2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu Bagian Pendidikan Agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota Islamic education in Indonesia yang disusun oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular, 2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3) mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.

Berdasarkan keterangan di atas, ada 2 hal penting yang berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

Masih pada laman yang sama, dijelaskan pula bahwa keberadaan pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Pada masa kolonialisme, dari Pondok pesantren lahirlah tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan

kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa dan tokoh-tokoh besar lainnya. Dapat dikatakan bahwa masa itu pondok pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya republik ini. Bila dianalisis lebih jauh dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana ini muncul tokoh-tokoh nasional yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, salah satu faktornya disebabkan figur Kyai sebagai pimpinan pondok pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok.

Pada masa pasca kemerdekaan, perkembangan pondok pesantren mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang Agama. Pada masa periode transisi antara tahun 1950–1965, pondok pesantren mengalami fase stagnasi, di mana Kyai yang disimbolkan sebagai figur yang ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang ditandai dengan bermunculannya partai politik bernuansa Islami peserta Pemilu pertama tahun 1955, contohnya dengan lahirnya Partai Politik NU yang mewaliki warga Nahdiyyin. Partai Politik NU tersebut dapat dikatakan merepresentasikan dunia pondok pesantren. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus dari parpol tersebut adalah Kyai yang mempunyai pondok pesantren.

Perkembangan pendidikan pondok pesantren pada periode Orde Baru seakan tenggelam eksistensinya karena seiring dengan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada kepentingan umat Islam.

Setitik harapan timbul untuk nasib umat Islam setelah era reformasi, pondok pesantren mulai berbenah diri lagi dan kembali mendapatkan tempat di kalangan pergaulan nasional. Salah satunya adalah pendidikan pondok pesantren diakui oleh pemerintah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pondok pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan tradisional yang ilegal, namun pesantren diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai kesetaraan dalam hak dan kewajibannya dengan lembaga pendidikan formal lainnya.¹¹

Peluang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh Pondok pesantren, agar dapat meningkatkan kembali peranannya dalam sistem pendidikan nasional. Namun yang terjadi peluang tersebut belum memberikan respon positif ke arah peningkatan kualitas pendidikannya. Salah satunya dapat diidentifikasi bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menitipkan anaknya untuk dididik di lembaga pendidikan pondok pesantren, dibanding ke sekolah-sekolah umum.

¹¹ Pada pasal 30 UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003 ditegaskan bahwa: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, *pesantren*, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Pembinaan pondok pesantren sebelum tahun 2000 dilakukan oleh salah satu Subdit di lingkungan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, yaitu Subdit Pondok Pesantren sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1979.

Dengan makin pesatnya perkembangan lembaga pondok pesantren dan pendidikan diniyah serta makin berkembangnya program dan kegiatan pembinaan bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah, subdit tersebut selanjutnya berkembang menjadi direktorat yang bernama Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren, sebagai salah satu dari empat direktorat yang ada pada Ditjen Kelembagaan Agama Islam sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001. Dengan berubahnya organisasi pembinaan menjadi direktorat tersebut, maka pendidikan di pondok pesantren dan pendidikan diniyah terus makin berkembang dengan pesat, dan mulai diakui di kalangan dunia pendidikan.

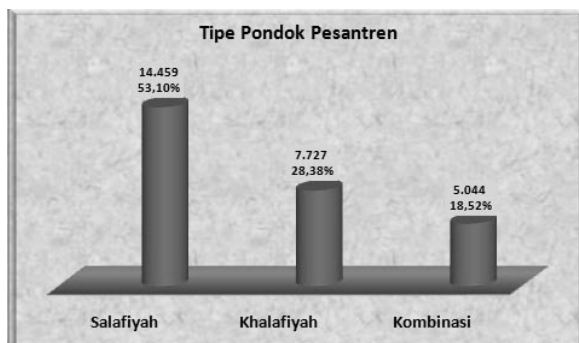
Seiring dengan berkembangnya pembinaan dan pengorganisasian Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam yang berubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok pesantren berubah pula menjadi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren. Perubahan itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005.¹²

¹² Profil Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/profil->

E. Data Statistik Pondok Pesantren

Pada laman situs *pendis.kemenag.go.id* dimuat data statistik pondok pesantren dari berbagai aspeknya sebagai hasil penelitian pada tahun 2011/2012. Pendataan pondok pesantren tahun 2011-2012 ini berhasil mendata 27.230 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada aspek kelembagaan, populasi pondok pesantren terbesar berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang berjumlah 78,60% dari jumlah seluruh Pondok pesantren di Indonesia. Dengan rincian Jawa Barat 7.624 (28,00%), Jawa Timur 6.003 (22,05%), Jawa Tengah 4.276 (15,70%), dan Banten 3.500 (12,85%). Dari seluruh Pondok pesantren yang ada, berdasarkan tipologi Pondok pesantren, terdapat sebanyak 14.459 (53,10%) Pondok pesantren Salafiyah, dan 7.727 (28,38%) Khalafiyah/Ashriyah, serta 5.044 (18,52%) sebagai Pondok pesantren Kombinasi (Gambar 1.1).¹³

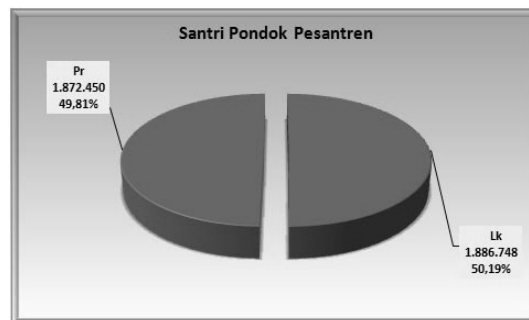


Grafik 1.1 Pondok Pesantren berdasarkan tipe, TP 2011/2012

direktorat-pd-pontren/, diunduh pada 21 September 2016.

¹³ Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012, *pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf*, diunduh pada 21 September 2016.

Adapun terkait jumlah santri Pondok Pesantren secara keseluruhan adalah 3.759.198 orang santri, terdiri dari 1.886.748 orang santri laki-laki (50,19%), dan 1.872.450 orang santri perempuan (49,81%). (Gambar 1.2.)



Grafik 1.2.
Jumlah Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Jenis Kelamin

Tenaga Pengajar Pondok Pesantren seluruhnya berjumlah 153.276 orang pengajar, terdiri dari 102.495 orang (66,87%) pengajar laki-laki dan 50.781 orang (33,13%) pengajar perempuan. Berdasarkan informasi tersebut, tenaga pengajar di Pondok Pesantren di dominasi oleh tenaga pengajar laki-laki (Gambar 1.7).



Grafik 1.3.
Jumlah Tenaga Pengajar Pondok Pesantren Berdasarkan Jenis Kelamin

Sejalan dengan data yang disampaikan oleh Kemenag tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Penelitian dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama H. Abdul Jamil pada saat pembukaan Musabaqah Fahmi Kubtubit Turats (Mufakat) di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Poncor pada bulan Juli 2011 lalu mengatakan bahwa jumlah santri pondok pesantren di 33 provinsi di seluruh Indonesia mencapai 3,65 juta yang tersebar di 25.000 pondok pesantren. Jumlah tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang patut dibanggakan.

Beliau menambahkan bahwa mutu pendidikan di lingkungan ponpes juga cukup baik. Sebagian ponpes masih menerapkan pendidikan tradisional, namun banyak juga sudah modern, sehingga tidak kalah bersaing dengan pendidikan yang ada di sekolah. Menurutnya pendidikan di lingkungan ponpes sebagai salah satu ujung tombak dari terselenggaranya pendidikan agama Islam yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama Islam yang tertuang dalam kitab suci al-Quran dan Hadits Nabi SAW.¹⁴

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada acara Bincang Nasional Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi Serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di kantor Bank Indonesia Surabaya, 5 November 2014 menyampaikan bahwa minat masyarakat untuk mempercayakan anak-

anaknya pada lembaga pendidikan pesantren sangat tinggi. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari peningkatan jumlah pondok pesantren di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Menteri Agama mengatakan bahwa selain dididik pengetahuannya, pesantren juga melangsungkan pendidikan karakter. Situasi pesantren yang seperti itu memberikan keuntungan tersendiri bagi peserta didik. Sebab, selain sebagai tempat diseminasi pengetahuan, pesantren juga menjadi komunitas belajar para santri bersama rekan-rekannya, sekaligus tempat belajar berinteraksi untuk hidup bersama, menerima perbedaan, dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Pesantren merupakan produk asli Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki ciri khas kelembagaan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain yang ada di negara manapun selain Indonesia. Memperhatikan hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memetakan tiga trilogi pesantren sebagai bekal pengembangan potensi ekonominya; yaitu segi pola pendidikan, aspek keagamaan, dan aspek sosialnya. Khusus untuk aspek sosial, beliau memaparkan potensi pesantren dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sebab, santri di pesantren, selain belajar keagamaan juga telah terbiasa dididik mandiri sekaligus terbiasa bersinggungan dengan manusia lainnya yang beragam dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pemerintah harus sigap dan secara sinergi menyiapkan kesetaraan regulasi, kesetaraan program, dan kesetaraan anggaran, agar pesantren tidak

¹⁴ Di Indonesia, Santri Ponpes Mencapai 3,65 Juta, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/11/07/19/lokvps-di-indonesia-santri-ponpes-mencapai-365-juta>, diunduh pada 21 September 2016.

melulu ketinggalan dengan lembaga negara lainnya.¹⁵

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menerbitkan Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015 yang disusun oleh Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Data-data yang disajikan tersebut merupakan rangkuman dari hasil pemutakhiran data pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015.¹⁶

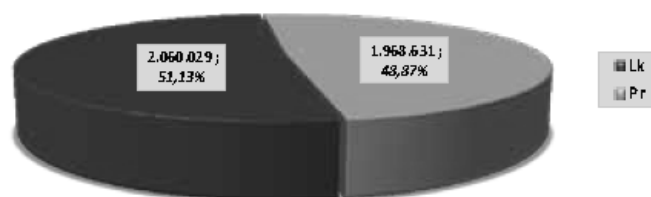
Terkait data jumlah pondok pesantren berdasarkan tipe, dari 28.961 pondok pesantren, sebanyak 15.057 (51,99%) hanya menyelenggarakan kajian kitab (kategori tradisional), dan 13.904 (48,01%) menyelenggarakan kajian kitab dan layanan pendidikan lainnya (kategori modern).



Grafik 1.4. Jumlah Pondok Pesantren Berdasarkan Tipe

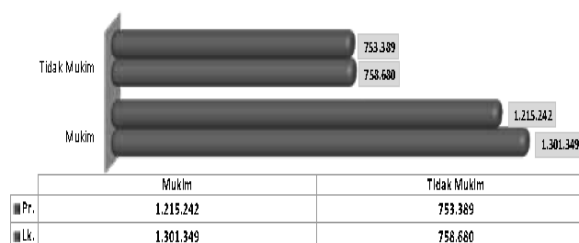
Adapun jumlah santri pondok pesantren berjumlah 4.028.660 orang dengan rincian 2.060.029 (51,13%) santri

laki-laki, dan 1.968.631 (48,87%) santri perempuan.



Grafik 1.5. Jumlah Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jumlah santri berdasarkan tempat tinggal adalah santri yang mukim sebanyak 2.516.591 orang, dengan jumlah santri laki-laki 1.301.349 (51,71%) dan santri perempuan 1.215.242 (48,29 %). Adapun jumlah santri non mukim sebanyak 1.512.069 orang. Dari jumlah tersebut, santri laki-laki berjumlah 758.680 (50,17%) dan santri perempuan 753.389 (49,83%).

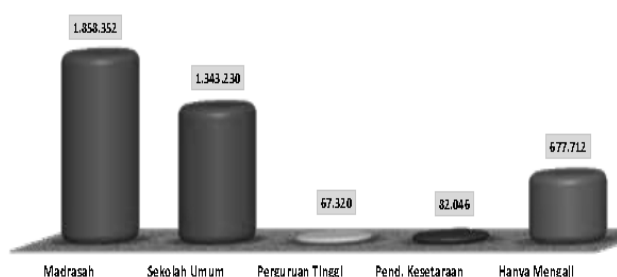


Grafik 1.6. Jumlah Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin

Terkait jumlah santri berdasarkan jenis pendidikan formal yang diikuti, dari sejumlah 4.028.660 orang, sebanyak 1.858.352 orang (46,13%) di Madrasah, 67.320 orang (1,67%) di Perguruan Tinggi, 82.046 orang (2,04%) mengikuti pendidikan kesetaraan, dan 677.712 orang (16,82%) hanya mengaji.

¹⁵ Lihat: Mengapa Harus Pilih Pendidikan Pesantren? Ini Jawabannya, <http://ditpdpondren.kemenag.go.id/berita/mengapa-harus-pilih-pendidikan-pesantren-ini-jawabannya/>, diunduh pada 21 September 2016.

¹⁶ Lihat: Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015, <http://pendis.kemenag.go.id/ebook/ebook20142015/>, diunduh pada 29 September 2016.



Grafik 1.6. Jumlah Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Jenis Pendidikan Formal yang Diikuti

Untuk data statistik perkembangan pondok pesantren berdasarkan berbagai kategori lainnya dapat dilihat selengkapnya pada buku Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015 tersebut.

F. Visi Pengembangan Pesantren Masa Depan

Telah banyak ahli dan praktisi pendidikan khususnya pendidikan Islam yang melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan visi pendidikan Islam melalui lembaga pesantren. Salah satunya adalah Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed. Beliau termasuk orang yang sangat menyelami problem dan dinamika sistem pendidikan pesantren. Dalam rangka menyelesaikan studi doktoralnya beliau mengambil objek kajian pada enam pesantren yang terkenal, yaitu Pondok pesantren (PP) An Nuqoyah (Sumenep-Madura), PP Salafiyah Ibrahimiyah (Situbondo), PP Blok Agung (Banyuwangi), PP Tebu Ireng (Jombang), PP Karangasem Muhamadiyah (Lamongan), dan PP Modern Darussalam Gontor (Ponorogo).

Setelah melakukan observasinya, Mastuhu menyampaikan kesimpulan tentang berbagai aspek positif dari sistem pendidikan pesantren yang perlu dikembangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional –melalui berbagai penyesuaian

dengan tantangan zaman- adalah sebagai berikut ¹⁷:

1. Pandangan pesantren bahwa manusia dilahirkan menurut fitrahnya masing-masing. Tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan daya-daya positif dan mencegah timbulnya daya-daya negatif.
2. Pandangan bahwa tugas melaksanakan pendidikan dipandang sebagai ibadah. Oleh karena itu, di dalam menjalankan proses kegiatan belajar-mengajar seyogyanya dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridha Allah.
3. Hubungan yang baik dan saling menghormati antara murid dan guru. Murid percaya bahwa dirinya tidak akan menjadi orang baik dan pandai tanpa guru. Dan guru di dalam melaksanakan tugasnya dirasakan sebagai mengemban amanah Allah SWT.
4. Lembaga Pendidikan Pesantren dipandang sebagai tempat mencari ilmu dan mengabdikan, bukan mencari kelas dan ijazah.
5. Metode belajar *halaqah* dan *sorogan* (disesuaikan dengan zamannya).
6. Nilai pendidikan dengan sistem asrama: 1). Pandangan bahwa dalam hal hak, orang sebaiknya mendahulukan hak orang lain daripada haknya sendiri. Tetapi dalam hal kewajiban, orang sebaiknya mendahulukan kewajiban diri sendiri sebelum orang lain. 2). Keteladanan dan berlomba dalam kebajikan dalam hal mengamalkan ajaran agama dalam hidup keseharian di pesantren.

¹⁷ Lihat Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 161-164.

7. Pandangan hidup jangka panjang dan menyeluruh, di mana bagi orang yang benar-benar percaya kepada Allah maka ia bersikap optimistis dalam menjalani kehidupan. Ia tidak akan putus asa jika menerima musibah, dan sebaliknya ia juga tidak lupa daratan jika memperoleh keuntungan, karena setiap peristiwa dipandang belum final. Semua peristiwa pada akhirnya akan kembali ke kebenaran Allah, sekalipun pada waktu itu ia belum mengerti.

Mastuhu juga memaparkan berbagai sisi negatif dari sistem pendidikan pesantren yang tidak perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pandangan bahwa ilmu adalah hal yang sudah mapan dan dapat diperoleh melalui berkah kyai.
2. Pandangan tidak kritis yang menyatakan bahwa apa-apa yang diajarkan oleh kyai, ustadz dan kitab-kitab agama diterima sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
3. Pandangan bahwa kehidupan ukhrawi paling penting, sedang kehidupan duniawi dipandang tidak atau kurang penting.
4. Metode belajar dengan menghafal dan pemikiran tradisional yang diterapkan untuk semua ilmu.
5. Kepatuhan mutlak pada guru dan pada kehidupan kolektif (asrama), sehingga dapat menghambat perkembangan individualitas (jati diri), dan menghambat timbulnya berpikir kritis.
6. Pandangan hidup fatalistis yang menyerahkan nasib kepada keadaan,

dan perilaku sakral dalam menghadapi berbagai realita kehidupan keduniawian sehari-hari.

Selain sisi positif dan negatif tersebut, Mastuhu juga menguraikan kesimpulannya tentang sisi *plus minus* yang perlu dikembangkan lebih lanjut dari sistem pesantren ke dalam Sistem Pendidikan Nasional, dengan catatan, setelah disempurnakan terlebih dahulu. Sisi *plus minus* tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Sistem asrama*. Untuk mencegah berbagai ekses negatif dari asrama, maka sistem asrama di masa depan harus mampu berfungsi sebagai forum dialog untuk mengembangkan ilmu dan kepribadian yang seimbang antara kepribadian individual dan kolektif. Dalam konsep 'asrama masa depan' hubungan para santri dengan keluarganya masing-masing tidak terputus dan mempunyai waktu berkumpul dengannya lebih sering, sehingga identitas keluarga dapat dijaga untuk tidak hanyut dalam kepribadian kolektif (asrama), tetapi ia tetap terikat selama 24 jam dengan program-program kegiatan ilmiah yang telah direncanakan bersama.
2. *Metode halaqah*. Metode halaqah di pesantren adalah cara belajar bersama antarsantri untuk memahami ajaran kyai, ustadz, dan isi kitab. Arahnya untuk menanyakan dari segi 'apa' dan untuk 'memiliki' ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadanya. Dengan kata lain metode yang digunakan dalam halaqah adalah menghafal. Hal seperti itu perlu dirubah dan ditingkatkan menjadi

menanyakan ilmu dari segi 'mengapa' dan 'bagaimana' perspektif atau perkembangannya mendatang, serta memperlakukan forum halaqah sebagai proses 'menjadi', yaitu memandang ilmu sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian intelektualnya

3. *Jenis kepemimpinan.* Kepemimpinan karismatik (agama) perlu dilengkapi atau dikembangkan dengan kepemimpinan rasional (ilmu), agar lebih mampu menghadapi tantangan zamannya.

G. Penutup

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pesantren telah memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah kehidupan umat Islam bahkan bangsa Indonesia pada umumnya. Pesantren bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, dan menyebarkan da'wah Islam, tapi juga menjadi tempat memupuk perlawanan bangsa Indonesia kepada pemerintah kolonial.

Berdasarkan data statistik yang disajikan, terlihat bahwa pondok pesantren telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari jumlah pondok pesantrennya maupun santri yang belajar. Data tentang jumlah santri dengan kategori jenis pendidikan formal yang diikuti menunjukkan cukup tingginya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pendidikan Islam secara lengkap termasuk dari jalur formal.

Dalam sistem pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pesantren terdapat banyak nilai-nilai positif yang harus dijaga dan dikembangkan, seperti; kesadaran

yang tinggi bahwa proses kegiatan belajar mengajar sebagai aktivitas ibadah, terciptanya hubungan yang baik antara guru (kyai, ustadz) dan murid (santri), pesantren sebagai tempat mencari ilmu yang terbebas dari tujuan duniawi semata, nilai-nilai dalam kehidupan asrama seperti, persamaan hak, mendahulukan kewajiban daripada meminta hak, dan lain sebagainya.

Disisi lain masih banyak pula sisi negatif dari proses pendidikan pesantren yang harus dibenahi, di antaranya: kecenderungan pengabaian kehidupan dunia, sikap fatalistis yang berlepas diri tanpa upaya keras dalam mencapai tujuan, kepatuhan mutlak pada guru yang cenderung mengarahkan santri untuk tidak berfikir kritis, dan sebagainya.

Oleh karena itu diperlukan kesungguhan dari semua pihak yang peduli terhadap pengembangan pendidikan Islam secara umum dan pondok pesantren pada khususnya, guna memperbaiki kekurangan yang ada ke arah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Fadjar, Malik, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: LP3NI, 1998
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Engku, Iskandar dan Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994

_____, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003

_____, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999

Nata, Abuddin, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

_____, (Ed), *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003

Nizar, Samsul, (Ed), *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda; Het Kantoor voor Inlandsche zaken*, Jakarta: LP3ES, 1996.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.

Zuhairini, et.all, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf.

<http://ditpdpontren.kemenag.go.id/profil-direktorat-pd-pontren/>

Statistik Pendidikan Islam Tahun Pelajaran 2014/2015, <http://pendis.kemenag.go.id/ebook/ebook20142015/>.

Santri Ponpes Mencapai 3,65 Juta, <http://www.republika.co.id/berita/du-nia-islam/islam-nusantara/11/07/19/lokvps-di-indonesia-santri-ponpes-mencapai-365-juta>

Mengapa Harus Pilih Pendidikan Pesantren? Ini Jawabannya, <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/berita/mengapa-harus-pilih-pendidikan-pesantren-ini-jawabannya/>